

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian terhadap pengaruh Jumlah Pengangguran, PDRB Perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin, terdapat beberapa kesimpulan yang bisa didapatkan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis, penelitian menyatakan bahwa Jumlah Pengangguran (JP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin (JPM) di Provinsi Aceh. Artinya menandakan bahwa peningkatan JP berpotensi meningkatkan JPM, sesuai dengan hipotesis pertama.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa PDRB Perkapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh. Artinya menandakan bahwa peningkatan PDRB Perkapita berpotensi menurunkan JPM, sesuai dengan hipotesis kedua.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Artinya menandakan bahwa peningkatan IPM berpotensi menurunkan Jumlah Penduduk Miskin, sesuai dengan hipotesis ketiga.

#### **V.2 Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilangsungkan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a) Saran Teoritis
  1. Variabel independen lain di luar variabel penelitian ini sebaiknya digunakan oleh peneliti masa depan yang ingin mempelajari kemiskinan agar dapat mengidentifikasi elemen indikator makroekonomi tambahan yang dapat memberikan dampak lebih mendalam terhadap jumlah penduduk miskin.
  2. Diharapkan penelitian selanjutnya akan menggunakan data jangka panjang. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian dapat memberikan

gambaran yang lebih lengkap dan tidak terbatas pada kurun waktu tertentu.

b) Saran Praktis

1. Diperlukan kebijakan yang memprioritaskan penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor yang menguntungkan seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian. Program-program untuk kewirausahaan dan pengembangan keterampilan juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada pengelolaan pekerjaan formal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah daerah dapat mendukung pertumbuhan sektor unggulan daerah, seperti agribisnis, energi terbarukan, dan wisata halal dengan memberikan insentif, menyederhanakan regulasi, dan memperluas akses terhadap sumber daya dan teknologi. Hal tersebut dapat dicapai melalui program pembangunan yang inklusif, seperti pelatihan tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah.
3. Pemerintah daerah harus fokus memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan. Untuk pendidikan, guru perlu mendapat pelatihan rutin agar pengajaran lebih baik, dan kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Di bidang kesehatan, fasilitas yang memadai harus tersedia, terutama di daerah terpencil. Program pencegahan stunting juga perlu diperkuat dengan edukasi gizi, pemeriksaan rutin, dan pemberian makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap membangun daerah.